

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN
BASIRIH HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

* **Jumia Aminatul Umrah¹⁾, Puput Ratnasari²⁾, Wijoko Lestario³⁾**

1) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universita Palangka Raya,

Indonesia

2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universita Palangka Raya,

Indonesia

3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universita Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dialami oleh sebagian besar penduduk negara berkembang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi individu dan kelompok yang tidak memenuhi hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Basirih Hilir sudah berjalan dengan jumlah penerima PKH 3 tahun terakhir ini terbanyak mulai tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan teori dari George C. Edward III mengenai Implementasi Kebijakan dengan empat indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara serta data dokumentasi dan pendukung lainnya berupa dokumen-dokumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih belum efektif dimana ini dirasakan oleh beberapa masyarakat sebagai KPM juga dari staf Kelurahan berbanding terbalik dengan pernyataan pendamping PKH bahwa kegiatan komunikasi sudah terjalin dengan baik, sumber daya didalam PKH ini masih harus dioptimalkan lagi karena pendamping PKH merasa bahwa pendamping PKH masih belum banyak untuk jangkauan wilayah yang terbelang jauh, disposisi didalam program keluarag harapan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai SOP yang berlaku namun tetap saja masih ada beberapa KPM yang tidak tepat sasaran, namun pendamping PKH terus melakukan hal-hal yang bisa mengatasi ketidak tepat sasaran ini, sturktur birokrasi didalam kinerja pendamping PKH, mereka bekerja dengan menyesuaikan dengan pedoman SOP yang berlaku namun tetap tidak baku dikarenakan mereka bekerja secara fleksibel saja.

Kata Kunci: Implementasi; Kemiskinan; Program Keluarga Harapan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dialami oleh sebagian besar penduduk negara berkembang. Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan menjadi masalah yang tidak kalah pentingnya dengan permasalahan negara yang lain. Sehingga perlu berbagai upaya dalam menanganinya agar senantiasa mampu mewujudkan sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi masalah utama dalam membahas kesejahteraan masyarakat umum (Setiawan, 2023).

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga dan meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan, maka pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) pada Provinsi Kalimantan Tengah mulai diberlakukan pada tahun 2010 dengan fokus diberbagai kabupaten dengan sebaran desa yang memiliki koefisien penduduk miskin yang tinggi. Pada tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan terbanyak mencapai 11.000 orang. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat yang mana melalui program ini mendapatkan banyak manfaat untuk masyarakat, di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan berdasarkan data Pendamping PKH Kecamatan jumlah penerima PKH pada tahun 2022 sebanyak 880 Orang yang mana merupakan jumlah penerima PKH terbanyak setelah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebesar 879 orang.

Kelurahan Basirih Hilir menjadi salah satu penerima PKH terbanyak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dikarenakan pekerjaan masyarakat yang tidak memadai dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil yang tentunya

masuk dalam komponen penerima PKH itu sendiri. Namun sangat disayangkan, fakta di lapangan masih banyak orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan sosial PKH ini atau bisa disebut penerima dari program PKH ini tidak tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program PKH di Kelurahan Basirih Hilir terdapat beberapa masalah yang perlu dipertanyakan dan perlu dicarikan solusinya. Adapun permasalahan implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Basirih Hilir dikarenakan oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Tidak tepat sasaran dalam melakukan pendataan RTSM sebagai penerima manfaat PKH.
2. Berdasarkan data PKH di lapangan yang muncul ialah hasil verifikasi KPM oleh pendamping masih dijumpai adanya peserta PKH yang tidak memenuhi syarat namun mendapatkan bantuan PKH, sementara disisi lain masyarakat yang memenuhi syarat sebagai peserta PKH namun justru tidak masuk di data penerima PKH tersebut.
3. Adanya kesalahan memfungsikan dana PKH yang diterima oleh peserta PKH untuk hal-hal yang tidak dianjurkan dalam program PKH.

Hal tersebut terkesan tidak adil, juga kerap menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Peserta PKH diharapkan benar-benar masyarakat yang miskin atau masyarakat yang secara tingkat perekonomiannya rendah/dibawah rata-rata. Oleh sebab itu sangat diperlukan penelitian lebih lanjut yang mana diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi agar pengimplementasian PKH sesuai dengan aturan yang ada dan tepat sasaran, berdasarkan data, fakta, serta permasalahan yang dijelaskan di atas yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat melalui program PKH di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur salah satunya di Kelurahan Basirih Hilir, belum berjalan sesuai dengan aturan dan masih ada beberapa hambatan atau hal-hal yang menjadi kendala yang membuat pelaksanaan program PKH kurang optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian secara komprehensif terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan

judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur”.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik adalah keseluruhan proses kerja sama dilakukan aparatur negara atau pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik. Menurut (Dunn, 2003) merumuskan kebijakan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.

Teori dari George C. Edward III mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat tujuan kebijakan itu sendiri. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct Indirect Impact on Implementation*. Pendekatan milik Edward III (1980) dalam (Pito et al., 2005) ini memiliki empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edward III (1980) dalam (Meutia, 2018) Komunikasi merupakan indikator yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga komponen yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan dari indikator komunikasi tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Transmisi, merupakan komunikasi yang dapat disalurkan dengan baik dan diharapkan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Namun, seringkali terjadi penyaluran komunikasi dengan

adanya salah pengertian (mis komunikasi), hal tersebut disebabkan komunikasi yang terjadi melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan bisa berubah.

- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima para pelaksana kebijakan yang tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi di dalam melaksanakan kebijakan sehingga tujuan dapat dicapai serta diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan di dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Ini karena jika perintah yang diberikan berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (1980) dalam (Sutopo, 2011) Sumber daya merupakan hal yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Komponen sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM) yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas).
- b. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan (*implementor* harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan) dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana

dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.

- d. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan mewakili wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi/Sikap

Menurut Edward III (1980) dalam (Hayat, 2018) Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki hasrat dan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal-hal yang perlu dicermati pada indikator disposisi adalah sebagai berikut:

- a. Efek disposisi, ialah sikap pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan serta pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi para kebijakan yang telah ditetapkan, demi kepentingan masyarakat.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi, mensyaratkan implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Penunjukan serta pengangkatan staf birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan system pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

- c. Insentif, merupakan salah satu teknik yang disarankan didalam mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (1980) dalam (Rushananto, 2014) Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Edward III (1980) menekankan diperlukannya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaannya program melibatkan lebih dari satu institusi. Edward III juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan *fragmentasi*, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan serta menyediakan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan (Kountur,

2007). Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada fakta-fakta yang bersifat faktual yaitu gambaran tentang Implementasi Program Keluarga Harapan, dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini akan disampaikan secara detail mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) didalam penanggulangan kemiskinan tepat nya di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi ialah salah satu indikator yang sangat penting untuk dilakukan didalam suatu implementasi kebijakan publik, tanpa komunikasi implementasi kebijakan publik tidak akan pernah berjalan dengan baik. Komunikasi sangat penting didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Indikator komunikasi memiliki tiga unsur untuk mengukur keberhasilan komunikasi antara lain transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara peneliti dimana komunikasi antara staf kelurahan dan pendamping PKH menganggap bahwa komunikasi mereka belum terlalu efektif dikarenakan pendamping PKH di Kelurahan Basirih Hilir baru sedangkan pendamping Kecamatan tidak bisa selalu ke Kelurahan Basirih Hilir, sebaliknya komunikasi antara pendamping PKH dan KPM juga dirasakan masyarakat belum begitu efektif karena komunikasi hanya melalui wa grup saja walau ada beberapa kali pertemuan dengan KPM namun masih dirasakan kurang. Namun dibalik ketidak efektifan komunikasi yang dirasakan, pendamping PKH tetap melakukan beberapa pendekatan melalui komunikasi seperti melaksanakan pertemuan, datang langsung kerumah KPM lansia, dimana di pertemuan ini pendamping KPM akan menjelaskan secara rinci mengenai syarat dan komponen didalam Program Keluarga Harapan.

Menurut teori yang peneliti gunakan dari indikator komunikasi dimana komunikasi antara staf kelurahan, pendamping PKH, dan masyarakat masih kurang efektif, dikarenakan komunikasi kebanyakan melalui wa, walaupun ada melaksanakan pertemuan namun masih belum efektif, pendamping PKH tingkat Kelurahan yang masih baru jadi masih masa penyesuaian, dimana artinya komunikasi yang terjadi masih jauh dari harapan, namun sedikit banyaknya baik staf kelurahan, pendamping PKH dan masyarakat tetap melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi juga pemberian informasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal yang tidak pernah tertinggal dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya memiliki 4 indikator unsur yang mempengaruhi kebijakan yaitu, staf sumber daya manusia, informasi dalam implementasi kebijakan, wewenang, dan fasilitas fisik. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini tentunya harus memiliki staf yang ahli, memadai, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik.

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara peneliti dengan Staf Kelurahan Basirih Hilir yaitu Kaur Pembangunan selaku operator Kelurahan, para pendamping PKH baik Kelurahan juga Kecamatan, dan masyarakat penerima PKH, didalam sumber daya terkait Program Keluarga Harapan ini, pihak Pendamping PKH akan melakukan validasi pertama dari data yang sudah ada di DTKS dimana data penerima PKH bukan pendamping PKH daerah yang menentukan para KPM namun keputusan akhirnya berada di pihak pusat.

Seringnya ketidak tepat sasaran bagi penerima PKH membuat pendamping PKH melakukan beberapa tahapan untuk mengantisipasi hal tersebut, seperti memberitahukan perihal peserta KPM yang komponennya sudah tidak ada lalu mengecek ulang data di DTKS, dan menanyakan kembali kepada RT terkait siapa saja masyarakat yang masih masuk didalam komponen PKH.

Dari segi sumber daya manusia seperti pendamping PKH dirasakan masih kurang dikarenakan luas wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dari satu ke lainnya

lumayan jauh, sedangkan tenaga pendamping PKH masih belum banyak, seperti yang sudah disampaikan didalam hasil wawancara bahwa pihaknya sudah mengusulkan setiap tahun penambahan pendamping PKH ke pihak pusat namun selalu saja di tolak. Didalam bekerja pendamping PKH tentunya melaksanakan tugas nya sudah melalui pelatihan-pelatihan, juga arahan dari pihak pusat sebelum Covid-19 muncul pelatihan dilaksanakan secara tatap muka sebaliknya saat ini dilaksanakan secara daring melalui via zoom meeting.

Menurut teori yang peneliti gunakan dari indikator sumber daya dimana baik sumber daya manusia dari staf kelurahan yang bertugas sebagai operator kelurahan, juga pendamping PKH, dan masyarakat yang menjadi penerima PKH dari hasil penelitian peneliti tidak bisa dikatakan sudah memenuhi sumber daya, namun tidak bisa juga dikatakan kekurangan dikarenakan masih bisa di jalankan tugas dan fungsi mereka secara baik, sinergi yang harus terus dilakukan dari staf kelurahan, pendamping PKH, juga masyarakat sebagai KPM agar kegiatan program Keluarga Harapan di Kelurahan Basirih Hilir ini dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang ada.

3. Disposisi

Disposisi merupakan suatu hal yang penting didalam mempengaruhi terlaksananya kebijakan publik agar dapat berjalan dengan baik, sebab disposisi merupakan para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Terdapat 3 indikator disposisi yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : efek disposisi, pengaturan birokrasi, insentif.

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara peneliti terkait disposisi Program Keluarga Harapan ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal program yaitu sebagai penanggulangan kemiskinan yang ada di Kelurahan Basirih Hilir ini disesuaikan dengan SOP yang terdapat di SK pendamping PKH. Melayani KPM dengan baik setiap ada keluhan dari masyarakat terkait program PKH ini.

Ketidak tepatan sasaran didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan membuat pendamping PKH melakukan beberapa langkah untuk mengatasi hal tersebut, seperti datang secara langsung kerumah KPM menjelaskana terkait komponen-komponen yang ada di dalam PKH, jika KPM tersebut tidak masuk lagi didalam

komponen maka pendamping PKH akan menanyakan apakah bersedia untuk keluar dari KPM dan tentunya membuat surat pernyataan terkait hal tersebut, jika KPM tidak bersedia dari pendamping PKH akan tetap melakukan perubahan data di DTKS terkait informasi komponen KPM.

Koordinasi dengan pihak RT, kelurahan serta melaksanakan survei secara langsung kerumah KPM merupakan langkah yang harus dilakukan, dan perihal KPM yang tidak komponen namun tetap menerima dana PKH itu dikarenakan data-data KPM di DTKS belum di revisi ulang dan langsung di setuju oleh pusat, maka nya dari pendamping PKH akan melaksanakan survei ulang terkait hal tersebut sebagai langkah mengatasi tidak tepat sasaran pelaksanaan PKH ini.

Menurut teori yang peneliti gunakan dari indikator disposisi pendamping PKH sudah melaksanakan tugas nya dengan baik, dan melakukan terus langkah-langkah guna mengatasi ketidak tepat sasaran dari program PKH ini, memberikan penjelasan kepada masyarakat jika tidak ada komponen lagi dari yang bersangkutan sebagai penerima PKH yang harus bersedia keluar dari DTKS.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan tuntutan didalam pemerintahan yang bertugas menjalankan implementasi kebijakan dengan baik dan tentunya sesuai dengan harapan. Struktur birokrasi memiliki 2 unsur yang mempengaruhi standart operating procedure (SOP), melaksanakan fragmentasi sangat penting didalam pelaksanaan kebijakan seperti tersusunnya kegiatan para staf (pendamping PKH) sehari-hari dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara peneliti terkait struktur Birokrasi kinerja pendamping PKH disesuaikan dari SOP yang berlaku, namun terkait SOP ini hanya para pendamping PKH saja yang mengetahui sebaliknya staf kelurahan juga masyarakat tidak mengetahui hal tersebut mereka hanya mengetahui jika pendamping PKH melaksanakan tugas dan pekerjaan saya dengan baik. Kinerja yang dilaksanakan oleh pendamping PKH dilaksanakan secara fleksibel saja tidak ada aturan baku yang membuat pendamping PKH harus bekerja di lapangan terus, namun pendamping PKH bisa bekerja ke Dinas mengantar berkas serta data data KPM yang

didapatkan, proses memasukan data masyarakat sebagai calon KPM dan merevisi data data KPM yang tidak masuk didalam komponen lagi bisa melalui rumah saja.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa verifikasi data terakhir atau final nya ada di bawah wewenang pihak pusat dari pihak daerah hanya memberikan rekomendasi saja seperti pihak rt yang bisa memberikan rekomendasi lalu pihak pendamping PKH melakukan survei dan memvalidasi tingkat pertama, lalu jika ada tidak tepat sasaran didalam data pendamping melakukan langkah-langkah yang sudah peneliti sampaikan sebelumnya menjelaskan secara detail terkait komponen, lalu jika dana yang diberikan tidak digunakan dengan tujuan awal maka pihak pendamping PKH yang melakukan peneguran kepada KPM.

Menurut teori yang peneliti gunakan dari indikator struktur birokrasi kinerja pendamping PKH disesuaikan dengan SOP yang terdapat didalam SK pendamping PKH namun didalam pelaksanaan kinerja dilaksanakan secara fleksibel saja, tidak terlalu baku. Alur penjelasan kepada masyarakat pun dilaksanakan secara detail.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur

Menurut pengamatan peneliti didalam wawancara peneliti dengan para narasumber terkait dengan pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Basirih Hilir ini dari komunikasi yang dilakukan sudah cukup dikarenakan pendamping PKH melaksanakan komunikasi melalui kegiatan komunikasi secara langsung melalui pertemuan dengan KPM juga tidak langsung melalui grup wa. Namun dibalik itu semua tidak banyak masyarakat mengatakan jika komunikasi belum terjalin dengan baik dan efektif ini hal yang menjadi penghambat dari PKH didalam komunikasi.

Lalu selanjutnya dari sumber daya tingkat pendukung dari sumber daya ialah pendamping PKH yang menjalankan tugas disesuaikan dengan SOP yang ada dan mendapatkan dana dari dana APBD daerah tentunya ini menjadi faktor pendukung dari sumber daya, walau aja saja penghambata yang terjadi di sumber daya seperti

pendamping PKH yang masih kurang banyak dikarenakan luas wilayah yang cukup luas namun tetap saja para pendamping berusaha dengan optimal untuk bekerja walau dengan jumlah pendamping yang dirasakan terlebih dari pendamping PKH Kecamatan menyatakan jika masih kurang.

Menurut pengamatan peneliti dari disposisi pendamping PKH sudah menjalankan tugas nya dengan baik, setiap data data dari KPM selalu di cek kembali oleh para pendamping PKH sebelum divalidasi di data DTKS. Dari segi penyaluran dana PKH ada saja yang masih tidak tepat sasaran dikarenakan data data yang ada di DTKS masih belum diperbaharui, maka dari itu pihak pendamping PKH akan mengecek ulang guna memperbaharui data data KPM.

Selanjutnya dari struktur birokrasi yang ada sudah dilaksanakan dengan baik bekerja sesuai SOP dan fleksibel menjelaskana secara detail terkait PKH kepada masyarakat. Tidak ada hambatan yang berarti dari kinerja pendamping PKH hanya saja pendamping PKH sering menemukan masyarakat penerima PKH masih belum bisa mandiri.

Dapat disimpulkan dari keempat indikator implementasi PKH ini baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi ada saja faktor penghambat yang menjadi penghambat dari program ini namun dapat diatasi dengan berbagai faktor pendukung yang ada, seperti komunikasi yang tidak efektif pendamping PKH terus berupaya melakukan komunikasi bisa melalui pertemuan, datang kerumah masyarakat langsung, juga melalui via grup wa, selanjutnya sumber daya walau sumber daya manusia dari segi pendamping PKH masih belum banyak namun mereka tetap bekerja dengan maksimal seperti mengecek kembali data data mengatasi ketidak tepat sasaran penyaluran dana PKH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti menarik kesimpulan Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten

Kotawaringin Timur dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III yang terbagi menjadi 4 indikator, sebagai berikut :

1. Komunikasi antara staf kelurahan dan pendamping PKH masih belum terlalu efektif dikarenakan pendamping PKH di Kelurahan Basirih Hilir masih baru dan masih masa penyesuaian, sebaliknya komunikasi antara pendamping PKH dan KPM juga dirasakan masyarakat belum begitu efektif. Sedikit banyak nya baik staf kelurahan, pendamping PKH dan masyarakat tetap melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi juga pemberian informasi.
2. Sumber Daya manusia dari segi pendamping PKH di Kelurahan Basirih Hilir masih dirasakan kurang memadai apalagi jika wilayah KPM yang cukup jauh, dari segi fasilitas pun laptop yang digunakan bukan dari bantuan pemerintah melainkan kepemilikan pribadi, namun pemerintah tetap membuat anggaran perjalanan bagi pendamping PKH. Serta memberikan pelatihan-pelatihan guna memantapkan kinerja dari para pendamping PKH saat menjalankan tugas nya.
3. Disposisi dari pelaksana (Pendamping PKH) di Kelurahan Basirih Hilir sudah melaksanakan tugasnya cukup baik, mereka melakukan langkah-langkah yang bisa mengatasi tidak tepat sasaran dari program PKH ini, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat jika tidak ada komponen lagi dari yang bersangkutan sebagai penerima PKH maka harus bersedia keluar dari kepesertaan PKH.
4. Struktur Birokrasi kinerja pendamping PKH sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh pemerintah dan fragmentasi (pembagian tugas) untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Basirih Hilir yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah adanya pemberian anggaran perjalanan bagi pendamping PKH dan pelatihan-pelatihan guna memantapkan kinerja dari pendamping PKH saat menjalankan tugas nya. Erat kaitannya dengan disposisi yang melaksanakan program ini dengan cukup baik, mereka melakukan langkah-langkah yang bisa mengatasi tidak tepat sasaran

dari program PKH. Struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2. Faktor Penghambatnya adalah komunikasi antara pendamping PKH dengan beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa komunikasi belum terjalin dengan baik. Sumber daya manusia yang masih kurang memadai dan fasilitas yang digunakan saat pendataan KPM bukanlah bantuan dari pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran yang bisa memeberikan masukan kedepannya untuk pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Basirih Hilir sebagai perangkat Pemerintahan yang terlibat langsung dalam pengelolaan PKH agar lebih meningkatkan kualitas komunikasi secara persuasive, terlebih khusus terhadap masyarakat penerima PKH demi mengatasi kemiskinan di Kelurahan Basirih Hilir. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kelurahan Basirih Hilir harus lebih ditingkatkan lagi seperti sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pendamping Program Keluarga Harapan.
2. Bagi pendamping PKH diharapkan bisa meningkatkan motivasi kerja yang dimiliki seperti perlu adanya identifikasi sebagai bentuk pendataan ulang masyarakat secara objektif dalam penentuan peserta untuk meminimalisir tidak tepat sasaran dalam pemilihan peserta PKH.

Bagi masyarakat agar lebih mandiri dan bersikap jujur, jika memang sudah tidak termasuk di dalam komponen penerima PKH silahkan melaporkan diri kepada pendamping PKH. Dan masyarakat diharapkan mampu memahami ketentuan umum PKH agar kedepannya berjalan lebih baik lagi.

REFERENSI

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University.
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. In *Intrans Publishing*.

- Kountur, R. (2007). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Meutia, I. F. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. AURA.
- Pito, T. A., Efriza, & Fasyah, K. (2005). *Mengenal Teori - Teori Politik*. Kolofon.
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.
- Setiawan, F. (2023). Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 41–50.
- Sutopo, M. F. (2011). *Pengembangan Kebijakan Pembayaran Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Air Minum (Studi Kasus DAS Cisadane Hulu)*. Institut Pertanian Bogor.